**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 47/PID.B/2018/PN
MANDAILING NATAL PADA KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh :Nurul Ibda Aprilia Rangkuti

Pembimbing I : Dr. Mexasai Indra, S.H.,M.H

Pembimbing II : Elmayanti, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Kelayau Nomor. 47b, Kec. Sail, Pekanbaru

Email:Nurulibdaaprilia@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems that occur in the Criminal Justice System is the violation of rights at one or all levels of examination. These violations can be in the form of procedural violations, administrative violations, personal violations of the suspect to serious violations such as the fabrication of witnesses and the fabrication of evidence of a case. If a suspect's information which is allegedly committed a criminal act is used as evidence for the investigator, it turns out that the acquisition is based on pressure or coercion that results in psychological and physical suffering and creates fear. Acquisition of information as evidence must be declared invalid because it may contain an engineered confession. Violations of procedures and misidentification of victims of criminal acts that still occur today are seen as a result of the weak professionalism of law enforcement officers. Cases of wrong procedures and wrong investigations can lead to errors in determining the culprit or what is often called a wrong arrest. This happened in Case Number 47 / Pid.B / 2018 / PN Mandailing Natal. The purpose of writing this thesis, namely: first, knowing juridical analysis of Decision Number 47 / Pid.B / 2018 / PN Mandailing Natal on victims of wrongful arrest based on Law Number 8 of 1981 concerning KUHAP. Second, knowing the basic analysis of judges' consideration of Case Decision Number 47 / Pid.B / 2018 / PN Mandailing Natal for victims of wrongful arrests under Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP.

The type of research used in this legal research is the normative juridical method. Therefore, it is used an analysis with a qualitative measure based on the substance of the data collection in drawing conclusions. In drawing conclusions the author uses the method of deductive thinking, which is a way of thinking that draws a conclusion from things that are general to things that are specific.

From the results of research and discussion it can be concluded, first, the existence of law enforcement officers who are not professional in carrying out their duties in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP. Second, the judge in deciding a criminal case must consider the formal requirements of evidence and regarding the strength of evidence the judge must see firsthand whether there is correspondence between one and another evidence, the judge should look at the facts that occur in the trial.

Keywords: Criminal Justice System, Wrong Arrest, Decision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan negara hukum adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang dapat membuat penderitaan bagi rakyat.¹ Dari pengertian tersebut dapat di tarik tujuan dari hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal daripada hukum. Namun yang idealnya adalah dalam setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan antara ketiga tujuan hukum di maksud, supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabaian dan kepincangan antara satu dengan lainnya. Akan tetapi jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berfikir untuk kemanfaatan dan kepastiannya.

Tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau kemungkinan sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah dan di cap sebagai penjahat. Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari kekeliruan.
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum satu orang yang tidak bersalah.²

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan menjamin atas hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang di maksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik,

mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.³

Perlindungan korban kejahatan sepertinya belum mendapatkan perhatian serius dalam sistem hukum nasional. Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (Offende rorientied). Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku.

Adapun penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas equality before the law, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya.⁴

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁵

³ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 8.

⁵ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 233.

¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 17.

Apabila suatu keterangan tersangka yang di duga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa. Pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana yang masih terjadi saat ini, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah penyidikan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.⁶

Salah tangkap atau yang biasa dikenal dengan sebutan error in persona ini bermula dari human eror atau kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Kesalahan dalam proses penyidikan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.

Salah satu kasus putusan yang sangat menarik untuk di tela'ah karena dalam kasus salah tangkap yang di alami oleh saudara Yusril Mahendra dengan Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dimana terjadi disparitas putusan terhadap saudara Yusril Mahendra di pengadilan tingkat pertama, oleh majelis hakim saudara Yusril Mahendra divonis 3 tahun 6 bulan dengan tuduhan yang di ancam yaitu Pasal 365 ayat 4 KUHPidana yaitu pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian. Padahal selama proses penangkapan sampai dengan putusan terdapat penyimpangan yang terjadi terhadap saudara Yusril Mahendra, mulai dari penganiayaan terhadap saudara Yusril Mahendra, selama proses persidangan saudara Yusril Mahendra juga tidak ditemani oleh penasehat hukum. Hal-hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP.

Kemudian pihak terdakwa melakukan upaya hukum banding di tingkat Pengadilan Tinggi hingga akhirnya memenangkan banding lewat putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 504/Pid/2018/PT MDN. Dengan keputusan itu, saudara Yusril Mahendra bebas dari segala dakwaan sehingga berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal Pada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?
2. Bagaimanakah analisis dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Untuk mengetahui analisis dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.

⁶ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 116.

- b. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum terkhususnya bagi badan yang berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Definisi tentang apa yang di maksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (absolute justice). Dengan demikian, melalui peraturan yang berkesinambungan, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun citra keadilan itu tetap relatif, dapat ditetapkan suatu batasan apa itu adil menurut hukum. Relevansi teori-teori keadilan dengan hukum pidana terletak pada sifat dan tujuan fungsi pidana. Hukum pidana digolongkan ke dalam hukum publik, yaitu bidang hukum yang mengatur kepentingan hukum masyarakat, khususnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁷

Pemilihan dan penggunaan sarana-sarana penyelesaian sengketa hukum yang dikenal dalam kaidah peraturan perundang-undangan hukum pidana tergantung dari karakteristik dan tujuan hukum pidana. Hukum pidana yang ada pada saat ini disebut taterstrafrecht yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan dan orangnya. Hukum pidana yang ada pada saat ini, dapat pula disebut sebagai schuldstrafrecht, artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan.

Penetapan jenis sanksi pidana atau cara-cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam proses peradilan pidana yang berkaitan erat dengan konsep keadilan yang menjadi tujuan dari hukum pidana. Penggunaan sanksi pidana yang bersifat memaksa dan menderitakan pelaku pelanggaran hukum pidana, berorientasi pada keadilan retributif atau pembalasan.

Pelaksanaan hukum pidana pada saat ini yang di jalankan dalam perspektif hukum pidana tat-taterstafrecht, sejalan dengan pemikiran Jan Remmelink, menegaskan bahwa dalam menerapkan hukum pidana dan ppidanaan, hendaknya memperhatikan prinsip relevansi keberlakuan hukum pidana, yaitu dua prinsip regulasi meliputi asas proporsional dan asas subsidiaritas. Asas proporsional menitikberatkan pada keseimbangan antara cara dan tujuan yang akan dicapai, sedangkan asas subsidiaritas, berkaitan dengan penggunaan sarana sanksi secara alternatif, hendaknya di pilih alternatif sanksi pidana yang paling sedikit mengambil kerugian. Penerapan kedua asas tersebut diperkuat dengan asas kepatutan. Teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).

Reaksi negara terhadap pelanggaran hukum pidana diberikan dalam bentuk penerapan sanksi pidana. Tujuan hukum negara adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat, maka keadilan dalam penegakkan hukum pidana lebih berorientasi pada keadilan masyarakat, kepentingan hukum masyarakat jauh lebih diutamakan. Pidana yang diterapkan mampu berfungsi prevensi general, pidana dijatuhkan agar orang lain takut melakukan perbuatan serupa.

Proses hukum pidana yang mewajibkan pelaku tindak pidana membayar atau memulihkan kerugian korban akibat perbuatan pidana merupakan cermin dari keadilan restoratif. Tujuan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian atau kerusakan akibat dari tindak pidana, sehingga pulih

⁷ Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progesif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2013, hlm. 116-125.

dalam normalitas semula. Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara negara-negara yang berdaulat. Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti impartiality (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan ide equality (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Jack Donnel, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang artinya adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak-hak Asasi Manusia adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, bahkan kelahiran Republik Indonesia adalah berdasarkan pengakuan Hak-hak Asasi Manusia itu, seperti dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Hak-hak Asasi Manusia tidak terpisahkan dan merupakan perlindungan terhadap nilai martabat manusia (The dignity of the human person), oleh sebab itu harus dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila.⁸

Menurut Theo Hujibers membedakan hak kodrati ke dalam 2 bagian, yaitu hak manusia (Human Rights) dan hak undang-undang (Legal Rights). Hak Manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak Manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada. Tidak bergantung pada persetujuan orang, merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia. Jadi Hak Manusia mempunyai sifat dasar, asasi, sehingga di sebut juga hak manusia (Human Rights). Sedang hak Undang-Undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh Undang-undang, maka pelanggaran hak ini dapat di tuntutan di pengadilan berdasarkan Undang-undang.⁹

Dari instrument-instrumen hukum yang berkaitan dengan penegakan HAM, serangkaian hak dan kebebasan asasi yang terancam penghormatan dan pemenuhannya, dalam kaitan upaya pemberantasan terorisme adalah rentan pelan ggaran terhadap: hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; penghormatan prinsip legalitas; hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang; hak bagi terciptanya pengadilan yang jujur (fair) termasuk hak didampingi penasehat hukum; kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; kebebasan berekspresi dan bersidang; kebebasan dari diskriminasi; kebebasan untuk mendapatkan suaka politik dari persekusi; dan penghormatan untuk hak-hak yang dilindungi dalam situasi darurat. Dalam rangkaian “criminal justice system” Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, dari mulai proses penangkapan, penahanan, dan penuntutan di pengadilan sampai pada tahap eksekusi dan resosialisasi kepada masyarakat.

⁸ Soedjono Didjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

⁹ Theo Hujibers dan Abdulkarim Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8-10.

Dengan pengaturan hukum yang ada maka pada dasarnya manusia adalah sama terutama di mata hukum, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan HAM tersebut. Pembatasan dalam ketentuan HAM dapat terjadi berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi HAM yaitu dalam hal perang atau keadaan darurat umum (public emergency) yang mengancam keselamatan negara. Namun ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak semacam ini disebut non derogable rights. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun mencakup: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi terhadap hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut. Selain itu non derogable rights ditambah lagi dengan hak-hak lain seperti untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (arbitrary arrest), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair and impartial trial), dan beberapa yang lain lagi.¹⁰

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan hak asasi tidak tergantung pada dan bukan berasal dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak bisa dicabut dan tidak bisa di batalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada HAM. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus di menangkan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum pidana di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap komponen-komponen penegakan hukum, baik peraturan maupun aparat penegak hukumnya. Tujuan dari pada penegakan hukum yakni untuk

mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹¹

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹² Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (undang-undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena

¹¹ RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 54.

¹² Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 15.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 190.

bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (undang-undang).

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Menyerasikan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

a) Faktor hukumnya sendiri;

b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting hal ini menjadi hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik, maksudnya menempatkan hukum itu pada tempat yang sebenarnya tanpa pandang bulu. Berbicara tentang kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum yang baik berarti kita berbicara tentang tatanan hukum.

Tatanan hukum dalam bahasa Belanda, "rech orde" ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat sebenarnya, yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup hal itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi agar tercapai kepastian, keadilan, dan efisiensi hukum itu.¹⁷

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 89.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6-8.

¹⁷ Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm.5.

menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁹
2. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan.²⁰
3. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.²¹
4. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau menderita mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²²
5. Salah tangkap atau Error in persona adalah suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak kepolisian terhadap orang yang akan dituju.²³
6. Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁴ Penelitian ini mengkaji

¹⁸ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1055.

²⁰ <https://www.pengertianmenurutparaahli.com>, diakses tanggal, 27 Mei 2019

²¹ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 124.

²² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 14.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.193.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (Statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.²⁶ Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal Pada Korban Salah Tangkap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.²⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
4. Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal.
5. Putusan Perkara Nomor 504/Pid/2018/PT Medan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁸

c. Bahan hukum Tersier

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 13.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan internet.

1. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pembuktian

1) Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan bukti. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk

mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

2) Teori Sistem Pembuktian

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem inipun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction-in time. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem.

3) Teori Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP terdapat dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas dua alat bukti tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tidak pidana tersebut memang benar terjadi dan terdawalah pelakunya. KUHAP menganut sistem pembuktian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

menurut Undang-Undang secara negatif, karena selain adanya minimal dua alat bukti, juga harus disertai dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut.

4) Alat-alat bukti dalam KUHAP

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk dalam alat bukti yang sah yaitu:

a. Keterangan Saksi, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

b. Keterangan Ahli, adalah keterangan yang diberikan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

c. Surat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntuk bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk, pengertian petunjuk terdapat dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang pada intinya berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena kesesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dalam ketentuan tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 88 ayat 2). Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk

diberikan kepada hakim berdasarkan pemeriksaan yang penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

e. Keterangan terdakwa, diartikan sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 198 ayat 1 KUHAP).

B. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1) Defenisi Putusan Pengadilan

Secara bahasa putusan bermakna hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara.

2) Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Pengadilan

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat.

3) Bentuk Putusan Pengadilan

a. Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa (Vrijspraak)

Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didawakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

b. Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (Ontslag Van Rechtsvervolging)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa (Veroordeling) atau Pidanaaan

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).

C. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

1) Sejarah Sistem Peradilan Pidana

Ilmu tentang administrasi peradilan pidana meminjam banyak sekali dari disiplin ilmu seperti hukum, sosiologis, ilmu politik, psikologi antropologi, dan sejarah. Sistem peradilan pidana untuk kali pertama diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.

2) Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggara Peradilan Pidana” atau System of administration of a criminal justice. Kata “Penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari ‘administration’. “Penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan istilah penyelenggara di atas, terdapat 3 (tiga) unsur/elemen pokok di mana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:

- 1) siapa/apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
- 2) apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
- 3) bagaimana prosedur (tata cara) lembaga dalam melaksanakan wewenangnya.

3) Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Mencegah kejahatan;
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;

6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

4) Model dan Tipe dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Packer menegaskan, bahwa ada lebih dari satu model normatif, tetapi tidak akan lebih dari dua model saja. Kedua model tersebut adalah the due process model dan the crime control model.

a. The due process model adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Terdapat beberapa nilai-nilai yang melandasi the due process model, yaitu:

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error menyebabkan proses ini menolak informal fact finding process sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal-adjudicative dan adversary fact finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (preventif measures) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
3. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin legal guilt;
4. Gagasan persamaan di muka hukum (equality before the law) lebih diutamakan;
5. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (criminal sanction).

b. Berbeda dengan the due process model, the crime control model lebih di maksud untuk memperoleh pengakuan. Nilai-nilai yang melandasi the crime model adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.

3. Proses kriminal penegak hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas. Model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan menyerupai model manajerial;
4. Asas praduga bersalah atau *presumption of guilty* akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien;
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurut penulis hakim belum melakukan penemuan hukum dan penafsiran-penafsiran terhadap kasus Yusril Mahendra. Hakim memutuskan kasus Yusril Mahendra secara kaku tanpa mempertimbangkan dan melihat banyaknya hal-hal yang janggal terhadap kasus ini. Sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang sehingga putusannya selalu dirasakan adil oleh masyarakat dan memberikan kemanfaatan dan kepastian. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan tiukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

Hukum selalu hidup di tengah masyarakat sebagaimana ungkapan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum sehingga dinamika hukum akan selalu berjalan bersama perkembangan masyarakat tempat di mana hukum itu berada. Hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga

mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

B. Bagaimanakah analisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal pada korban salah tangkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Menurut Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Bukan hanya itu menurut Pasal 114 KUHAP, dalam hal seorang tersangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Kalau hak tersangka untuk didampingi oleh advokat tidak diberikan sejak awal proses penyidikan, maka sudah menjadi hukum yang diakui oleh Negara-negara beradab bahwa perlakuan terhadap tersangka tersebut sudah bertentangan dengan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan

apabila hak tersangka untuk didampingi oleh advokat tidak diberikan termasuk ketika dalam proses-proses awal yaitu dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka seluruh pengakuan keterangan tersangka tersebut tidak pantas dipergunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini saya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan pidana dan kesalahan Pembandingan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali karena terdakwa /Pembanding bukan pelaku yang melakukan pencurian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa terdakwa sesungguhnya merupakan praktek pemidanaan yang dipaksakan. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan *a quo* Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan “membebaskan TERDAKWA/PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum”.

Dan dalam penegakan hukum, hal ini belum mencerminkan penegakan hukum yang baik dan benar. Sebagaimana penegakan hukum gunanya mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan yang terjadi dalam kasus yang menimpa saudara Yusril adalah dari faktor penegakan hukum. Para penegak hukum dalam kasus ini tidak bersifat professional dalam menjalankan tugasnya. Lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum menyebabkan penderitaan bagi salah satu korban yaitu saudara Yusril Mahendra.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian

dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu dihadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu

2. Dari dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan Perkara Nomor 47/Pid.B/2018/PN Mandailing Natal, dimana terdakwa mengalami “Testimonium De Auditum” justru dijadikan alat bukti yang kuat untuk menjerat terdakwa pada perkara Pasal 365 ayat (4) KUHPidana. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaanya. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* Tingkat Pertama. Serta ketidaksesuaian antara surat dakwaan penuntut umum dengan fakta di persidangan pada keterangan para saksi, serta dakwaan tunggal kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam dasar pertimbangan hakim bersifat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

B. Saran

1. Pertimbangan hakim perlunya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum progresif dan mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, tidak sekedar menerapkan Undang-Undang tetapi juga mencakup, memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim, sehingga tercapailah nilai-nilai keadilan demi kemanfaatan masyarakat, dan putusan hakim diharapkan menjadi yurisprudensi bagi *Judex Factie* dalam menangani perkara pidana.

2. Hakim dalam memutuskan perkara pidana harus mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti dan mengenai kekuatan pembuktian hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti satu dengan yang lain ada persesuaian atau tidak, juga hakim hendaknya melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Marhus, 2013, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Andang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ardiansyah, Irfan, 2017, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asnawawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- AusAID dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul, Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Didjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, CV Armico, Bandung.

- , 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamil, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Kencana, Depok
- Efendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartati, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hujibers, Theo dan Abdul Karim Muhammad, 2007, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husin, Kardi dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Timur.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Sofyan, Andi, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mappiesse, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Mulya Lubis, Todung, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pajar, Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Independen Publishing, Bandar Lampung.

Prakoso, Abintoro, 2016, *Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Samosir, C. Djisman, 2013, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum, Djambadan*, Jakarta

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Bandar Maju, Bandung.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UU Press, Yogyakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erdiansyah, 2010, *Kekerasan dalam Penyelidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

M. Syafie, 2012, *Instrumen Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*, artikel pada Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Vol.9, No.4 Desember.

Rodrigo Fernandes Elias, 2014, *Penemuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol 1, No.1 Januari.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M. Sihombing, 2012, "Penyelenggaraan Jaminan Sosial DiIndonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 9, No.2 Juli.

U. C Davic L Rev, 2020, *Recasting Reasonable Doubt: Desison Theory and The Virtues Of Variability* Jurnal West Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, tanggal 15 Januari dan di terjemahkan oleh Google Translate

C. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Website

<https://s.docworkspace.com> diakses tanggal 22 Januari 2020.

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com> diakses tanggal 27 Mei 2019.